

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arab Spring merupakan sebuah kalimat yang menggemparkan dunia baru- baru ini. Pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2011 bahkan sampai tahun 2013 merupakan pergolakan politik terberat yang dialami oleh negara- negara Timur Tengah. Bergugurannya satu demi satu pemimpin negara- negara di Timur Tengah seperti bergugurannya daun- daun pada saat musim semi menyebabkan peristiwa pergolakan politik ini disebut dengan Arab Spring¹. Bentuk dari Arab Spring ini adalah demonstrasi, kampanye anti pemerintah serta pemanfaatan social media untuk menjatuhkan pemerintah². Tujuan dari Arab Spring ini adalah menjatuhkan rezim- rezim otoriter Timur Tengah dan pengembalian kekuasaan kepada rakyat.

Kejadian Arab Spring ini bermula dari Tunisia pada tanggal 17 Desember 2010, ketika salah satu penjual buah di Tunisia bernama Mohamed Bouazizi yang berusia 26 tahun nekat melakukan bakar diri karena diperlakukan sewenang- wenang oleh petugas yang menagih uang denda dagangannya. Tidak terima dengan tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh petugas tersebut, Bouazizi kemudian melapor kepada pejabat pemerintah setempat. Namun yang diterima Bouazizi nihil, aduannya tidak ditanggapi. Kekecewaan Bouazizi berakhir tragis, Dia kemudian membakar diri sebagai bentuk protes.

Hal tersebut memancing emosi rakyat Tunisia dan terjadilah demo besar- besaran di seluruh wilayah Tunisia. Rakyat meneriakan frustasi dan amarahnya terhadap pemerintah karena kesulitan ekonomi yang semakin menjadi-

¹ Humphrey Wangke, “Arab Spring” Dan Perebutan Pengaruh Di Suriah’, *Jurnal Politika*, Vol 3 (2012), 001–161.

² A.V. Korotayev and J.V. Zinkina, ‘Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis’, *Entelequia - Revista Interdisciplinar*, 13.primavera 2011 (2011), 139–70.

menjadi. Perekonomian Tunisia yang semakin memburuk membuat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Ditambah dengan otoriternya sistem pemerintahan di Tunisia memperburuk keadaan. Rakyat menuntut Presiden Ben Ali yang berkuasa selama 33 tahun dipaksa xcuntuk lengser dari jabatannya³. Pemilu di Tunisia dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2011 merupakan pemilu pertama pasca diterapkannya demokrasi di Negara ini. Pemilu ini diikuti oleh 4.308.888 dari sebanyak 8.289.924 orang pemilih⁴.

Apa yang terjadi di Tunisia kemudian menjamur ke negara- negara Arab yang lainnya. Libya, negara yang berbatasan langsung dengan Tunisia menjadi negara di kawasan Timur Tengah yang melakukan aksi besar- besaran selanjutnya. Perang sipil yang terjadi di Libya berawal dari unjuk rasa yang dilakukan di Benghazi pada tahun 2011. Tujuan dari unjuk rasa ini adalah menuntut mundurnya Muammar Khaddafi dari jabatannya sebagai pemimpin Libya. Perang bermula dari tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes sehingga protes ini mengalami eskalasi menjadi perang saudara dan sebuah pemberontakan. Perang ini mengakibatkan ribuan warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara kedua kelompok bersenjata itu saling serang dengan senapan, meriam anti- pesawat dan roket. Gerakan protes anti pemerintah kemudian berhasil memaksa Khaddafi keluar dari persembunyiannya hingga akhirnya tewas di tangan oposisi pada tahun 2012. Di bawah Dewan Transisi Nasional, Libya mengadakan Pemilu Parlemen yang dilaksanakan pada Juli 2012⁵. Perang sipil Libya dikabarkan merupakan salah satu

³ Herdi Sahrasad, 'ARAB SPRING: PERUBAHAN REZIM DAN TEGANGAN HUBUNGAN AS – DUNIA ARAB REFLEKSI SOSIO- HISTORIS', *Jurnal CMES Volume VI Nomor 1, Edisi Januari - Juni 2013*, VI (2013), 36–54.

⁴ Budi Juliandi, 'Wakaf Dan Politik Di Tunisia', *AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2016), 137–44 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2857>>.

⁵ Muhammad Fakhry Ghafur, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya 1 Religion and

revolusi sosial- politik yang terjadi di jazirah Arab bersama-sama dengan Tunisia dan Mesir.

Revolusi juga terjadi di Maroko. Maroko melakukan demokratisasi dengan pemilu multi partai pada 27 November 2011. Hal tersebut terjadi karena ketakutan dari Raja Maroko, King Muhammad IV akan terjadinya gelombang aksi yang sama dengan Tunisia dan Mesir. Demokratisasi yang dilakukan oleh Maroko juga diikuti oleh Aljazair dan Yordania. Kedua negara tersebut mengikuti jejak Maroko untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Berbeda dengan Bahrain, dimana kelompok mayoritas Syiah harus menghadapi kelompok minoritas Sunni yang dibantu oleh Arab Saudi⁶.

Gelombang Arab Spring juga merambat ke Yaman, dimana rakyat menuntut Presiden Abdullah Shaleh untuk lengser dari jabatannya. Kejadian yang terjadi di Tunisia dan Mesir terulang kembali di negara ini. Presiden Abdullah lengser dan harus meninggalkan istananya setelah didemo besar- besaran oleh rakyat pada tanggal 23 April dengan imbalan kebebasan hukum. Namun Presiden Abdullah mengingkari persetujuan ini sehingga membuat pemberontakan di Yaman kembali berlangsung⁷.

Dampak dari *Arab Spring* masih terjadi di Suriah sampai sekarang. *Arab Spring* yang terjadi di Negara ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Revolusi yang terjadi di Suriah disebabkan oleh dua factor besar, yakni: Faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internalnya adalah masalah kediktatoran yang dilakukan oleh Presiden Bashar Assad serta masalah konstitusi dan pelanggaran HAM. Sedangkan faktor eksternalnya adalah tidak lain karena gelombang *Arab Spring* yang kuat terjadi

Democracy: The Emergence of the Power of Political Islam in Tunisia, Egypt and Libya', *Jurnal Penelitian Politik*, 11.2 (2014), 85–100.

⁶ M Muttaqien, 'Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional Dan Global', *Jurnal Global & Strategis*, 9.2 (2018), 262 <<https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.262-276>>.

⁷ Sidik Jatmika, 'The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik Di Kawasan Timur Tengah', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.2 (2016), 157–66 <<https://doi.org/10.18196/hi.2013.0037.157-166>>.

hampir di seluruh wilayah Negara- Negara Arab. Kelompok oposisi menuntut Presiden Bashar Assad untuk turun dari jabatannya. Kelompok minoritas Syiah yang berada dibawah Assad harus melawan kelompok mayoritas yang didominasi oleh kalangan Sunni. Karena kelompok yang mendukung presiden merupakan kelompok minoritas, maka kelompok ini meminta bantuan dari luar seperti Iran, Hezbollah dan juga Rusia untuk dapat menghadang kekuatan dari kelompok mayoritas.

Arab Spring di Suriah berujung pada *Power Struggle*. *Power Struggle* ini terjadi karena adanya intervensi secara langsung yang dilakukan Koalisi Amerika Serikat bersama Negara sekutunya. Kejatuhan rezim yang tidak sepenuhnya berhasil menyebabkan konflik berkepanjangan di Negara ini. Hal tersebut menyebabkan krisis humanitarian terbesar di dunia. Pada Februari 2011, situs- situs media sosial yang berada di dalam maupun di luar Suriah menyerukan demonstrasi besar-besaran menuntut agar pemerintah malakukan reformasi. Pendukung reformasi yang berada di luar Suriah mengirimkan modem satelit, telepon seluler serta alat- alat media sosial lainnya untuk mendukung hal tersebut⁸.

Demokratisasi juga terjadi di Irak. Pada hakikatnya, Amerika Serikat meluncurkan agresi militer besar- besarannya pada 2003. Kurang lebih sekitar 150.000 pasukan Amerika menduduki Irak secara paksa, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh sekiranya lima faktor. Faktor pertama yakni alasan Amerika Serikat mencari serta mengamankan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction*) yang disebut-sebut terdapat di Irak⁹. Faktor kedua adalah pembenaran bahwa Irak merupakan sarang teroris yang ditimbulkan dari masalah Saddam Husein. Faktor ketiga adalah Amerika beralasan *Operation Iraqi Freedom*, yakni pembebasan Irak dari diktator serta mempromosikan demokrasi. Faktor selanjutnya adalah

⁸ Sulistio Hermawan and M.Pd. M. Nur Rokhman, 'KONFLIK DI SURIAH PADA MASA BASHAR AL-ASSAD TAHUN 2011-2015', *Risalah Vol 3 Edisi 10 Oktober Tahun 2016*, vol 3 edisi (2016), 1-17.

⁹ Sam C Sarkesian, John Allen Williams, and Stephen J Cimbala, *US National Security : Policymakers, Processes & Politics*, Fourth (Colorado: Lynne Rienner, 2008).

Amerika Serikat membentuk koalisi dengan Israel untuk melawan ancaman strategis yang terjadi di Timur Tengah. Faktor Terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguasai lading minyak yang terdapat di Irak.

Adanya gelombang demokratisasi di timur Tengah tidak terlepas dari keterlibatan Amerika Serikat didalamnya. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat selain menjadi Negara superior juga menjadi Negara paling demokratis di dunia. Adanya keinginan Amerika untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh penjuru dunia semata- mata untuk mempermudah negaranya melakukan kerjasama.

Hal tersebut juga berlaku di Timur Tengah. Demokratisasi yang dicanangkan oleh Amerika Serikat melalui Politik Luar Negerinya yang bernama *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* ini bertujuan agar Timur Tengah tidak lagi menjadi Negara yang terus menerus berperang serta menjadi produsen teroris dunia. Kebijakan Politik Luar Negeri ini dikeluarkan setelah Amerika Serikat mendapat serangan teroris secara mendadak pada tahun 2001. Para teroris tersebut menyerang World Trade Center yang merupakan salah satu simbol Amerika Serikat.

Ambisi Amerika terhadap Timur Tengah sudah dimulai sejak akhir perang dingin antara blok barat dan blok timur. Keberhasilan blok barat membuat Amerika berusaha keras untuk membendung penyebaran paham komunis di seluruh dunia termasuk di Timur Tengah. Selain melakukan penghentian paham komunis, Amerika juga melakukan penyebaran paham demokrasi yang diakui sebagai sistem pemerintahan terbaik¹⁰. Untuk memperkuat kekuatannya, Amerika pada masa Regan banyak menjalin hubungan dengan negara- negara seperti Israel, Jordania dan Arab Saudi¹¹.

¹⁰ Lalu Wahyu Putra; Taufiq Utama Firmanda, 'Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi Dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017', *Jurnal ICMES*, 1.1 (2017), 25-44 <<https://icmes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/view/2>>.

¹¹ Azhari Setiawan, 'Diplomatic Dilemma Dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik SipilMiliter Mesir Tahun 2013', *JOM FISIP*, 2.SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-16-2 / ISSN 1314-2704 (2013), 1-39.

Amerika telah menyebarkan demokrasi ke tempat yang belum pernah mengenal demokrasi sebelumnya. Presiden Bush berkata dalam sebuah pidato yang dikemukakan pada bulan November tahun 2003 bahwa demokrasi akan meningkatkan perdamaian dan keamanan bagi negaranya dan juga Timur Tengah. Pidatonya tersebut juga menjelaskan tentang Inisiatif Kemitraan Timur Tengah. Yaitu menetapkan inisiatif pertama untuk mendukung upaya reformasi politik dan pengembangan ekonomi melalui perempuan dan pemuda¹².

Pidato tersebut bisa dikatakan sebagai bukti keterlibatan Amerika dalam Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Ambisi Amerika dalam mendemokratisasikan negara- negara yang belum menerapkan demokrasi sangat terlihat. Hal tersebut dikarenakan Amerika dapat dengan leluasa bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan negara demokrasi sehingga dapat menguntungkan Amerika sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis membentuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: **Bagaimana peran Forward Strategy for Freedom in the Middle East dalam melakukan demokratisasi menjelang Arab Spring di Irak dan Suriah than 2003-2013?**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan konsep intervensi serta teori *Peace Democracy Theory* untuk membantu menganalisa pokok permasalahan yang terjadi.

1. Intervensi

Intervensi menurut J.G Starke adalah sebuah tindakan propaganda yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan adanya revolusi atau peperangan di negara lain. Kemudian

¹² National Endowment, Democracy Address, and Middle East, 'National Endowment for Democracy Address on the Middle East', *Chamber of Commerce*, November, 2003, 1–8.

pengertian intervensi menurut Black's Law Dictionary yakni *one nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affair or in question arising between other nation* atau campur tangan satu negara dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dalam urusan internal negara lain atau dalam pertanyaan yang timbul antara negara lain. Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa intervensi merupakan salah satu bentuk penguasaan terhadap negara lain dengan adanya campur tangan dalam bentuk kekerasan atau dalam bentuk pernyataan yang timbul antara negara lain.

Istilah intervensi ini secara umum dapat digunakan untuk menangani berbagai kasus yang menjadikan senjata sebagai alat untuk pertahanan serta perlindungan rakyat serta berbagai kasus atas kehendak atau tidakan sendiri lainnya. Sebagaimana contoh- contoh aktual mengenai gangguan terhadap Negara lain, intervensi bisa berarti penggunaan senjata atau bahkan pengerahan kekuatan¹³. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan adanya keterlibatan satu Negara terhadap Negara lain. hal ini biasanya berarti adanya memaksakan sebuah kepentingan terhadap Negara lain. Intervensi bisa dikatakan mencampuri sebuah urusan Negara lain dengan berupa berdiri di belakanb pemerintahan yang berkuasa atau bisa saja dengan ancaman kekerasan¹⁴.

Hukum Internasional melarang adanya Intervensi apabila:¹⁵

- a. Berupa campur tangan terhadap masalah- masalah yang dimana setiap Negara dibebaskan untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka yakini benar. Hal tersebut bisa mengenai sistem politik, sistem ekonomi serta sistem politik luar negerinya, atau

¹³ Phillip C Jessup, *A Modern Law of Nations, Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).

¹⁴ J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, ed. by diterjemahkan Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R Agoes (Bandung: PT. Alumnii, 2015).

¹⁵ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, ed. by Bambang Iriana Djajatmadja (Jakarta, 2003).

- b. Berupa campur tangan tersebut berupa gangguan terhadap kedaulatan serta kemerdekaan Negara lain yang bersangkutan. Hal tersebut misalkan memberikan dukungan terhadap aktivis- aktivis yang mendukung adanya kerusakan terhadap Negara tersebut.

Bentuk Intervensi yang dilakukan oleh Amerika adalah turut campur dalam politik dalam negeri beberapa negara di Timur Tengah. Keeksotisan Timur Tengah menjadi daya tarik bagi Amerika untuk menguasai sumber daya alamnya. Minyak bumi yang melimpah merupakan tujuan utama Amerika melakukan intervensi terhadap Timur Tengah.

Masih dalam pidato Presiden Bush dalam *State of the Union*, Amerika masih terus memerhatikan pemerintahan Iran yang menindas rakyat. Selain itu Amerika juga mencari senjata pemusnah masal yang berada di Iran dan memberantas teror yang terjadi di negara tersebut. Presiden Bush juga mendukung warga Iran yang mempertaruhkan nyawa dan terus terintimidasi karena menyerukan demokrasi di Iran¹⁶

2. *Peace Democracy Theory*

Peace Democracy Theory merupakan sebuah teori yang berkembang pasca Perang Dingin I. Teori ini berpendapat bahwa Negara demokrasi tidak akan berperang melawan Negara demokrasi lainnya. Negara- Negara yang demokratis cenderung saling menghormati satu sama lainnya. Hal tersebut dikarenakan mereka menganut aturan-aturan serta norma yang sama dalam menjalankan kehidupan bernegaranya¹⁷. Selain aturan dan norma yang sama, rakyat juga mempunyai peranan besar dalam Negara demokrasi. Dibuktikan dengan Negara yang harus dengan sigap menanggapi apa yang rakyat butuhkan serta berpikir berapa banyak kerugian serta korban jiwa apabila terjadi

¹⁶ the washinton post, *Text of President Bush's 2003 State of the Union Address* (Washington DC, 2003).

¹⁷ Sebastian Rosato, 'The Flawed Logic of Democratic Peace Theory', 97.4 (2007), 585–602.

peperangan. Alasan tersebut memperkuat Negara demokrasi enggan berperang dibandingkan dengan Negara yang tidak menganut demokrasi.

Negara- Negara yang terikat dalam sebuah perjanjian internasional lebih memungkinkan menciptakan keamanan dunia apabila dibandingkan dengan adanya dewan atau pemerintahan yang mengawasi perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan suatu Negara akan lebih nyaman untuk membuat sebuah perjanjian daripada diawasi oleh dewan internasional. Bagi Negara Demokrasi, *Democrachy Peace* akan menciptakan perdamaian bagi sesama Negara yang menganut paham demokrasi pula. Dalam mencapai kepentingan nasional, suatu Negara demokrasi akan melakukan penyelesaian secara militer atau kekerasan apabila kepentingan nasionalnya menyangkut Negara non-demokrasi. Namun, akan terjadi hal sebaliknya apabila kepentingan tersebut menyangkut sesama Negara demokrasi. Negara demokrasi akan lebih menggunakan jalan non-militer untuk mencapai kepentingannya, seperti melakukan negosiasi, mediasi serta jalan diplomasi lainnya yang tidak menggunakan kekerasan.

Dalam kasus Arab Spring ini, Amerika Serikat menggunakan *Democracy Peace* dalam pembuatan Kebijakan Luar Negerinya. Kebijakan Luar Negeri yang kemudian disebut dengan *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* ini merupakan sebuah aplikasi dari *Democracy Peace* yang dimana Amerika Serikat berusaha membuat Negara- Negara Timur Tengah menjadi Negara demokrasi. Hal tersebut bertujuan agar muncullah perdamaian di Timur Tengah. Dengan Kebijakan Luar Negeri ini, Amerika juga menginginkan Timur Tengah dapat dengan mudah bekerja sama dengan Amerika dalam berbagai hal, khususnya dalam sumber daya alam dan minyak.

Democracy Peace melalui *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* ini pun digunakan sebagai dalih pembenaran atas invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang dikatakan sebagai sarang teroris.

Kemudian, Amerika Serikat pun melakukan *Pre-emptive war* untuk melawan Negara otoriter Irak dan kemudian membentuk pemerintahan boneka didalamnya. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan dukungan kepada kelompok oposisi di Suriah serta Libya. Melalui Kebijakan Luar Negeri ini, Amerika mengiming- imingi Timur Tengah dengan perdamaian serta membantu memberantas teroris yang menyebabkan Timur Tengah sangat rentan terjadi konflik.

Selain itu, Timur Tengah dianggap sangat cocok menggunakan demokrasi. Mengingat Timur Tengah merupakan Negara- Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta Islam berkembang bermula dari Timur Tengah. Dalam Kebijakan Luar Negeri ini pun dikatakan bahwa demokrasi dan islam merupakan dua hal yang bisa berjalan berdampingan. Amerika Serikat mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokrasi walau mayoritas menganut agama islam. Hal tersebut kembali meyakinkan Timur Tengah melakukan demokratisasi.

D. Hipotesa

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah hingga kerangka pemikiran selanjutnya dapat di tarik sebuah hipotesa bahwa terdapat beberapa peran Amerika Serikat dalam melakukan demokratisasi dalam *Arab Spring* di Irak dan Suriah melalui *Forward Strategy for Freedom in the Middle East*, dengan menggunakan:

1. Liberalisasi sipil
Memberikan ruang kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta pikiran dalam masyarakat Irak dan Suriah
2. Partisipasi politik sipil
Partisipasi politik masyarakat Irak dan Suriah seperti adanya perebutan kekuasaan antar etnis.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Amerika Serikat dalam demokratisasi di Timur Tengah
2. Menganalisa peran *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* dalam keberhasilannya melakukan demokratisasi di Timur Tengah khususnya di Tunisia
3. Menganalisa kegagalan peran *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* dalam melakukan demokratisasi di Timur Tengah khususnya di Suriah dan Tunisia.

F. Batasan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 2003- 2013. Diawali dari terhitungnya pernyataan Presiden Bush pada tahun 2003 tentang *Forward Strategy for Freedom in the Middle East* sampai puncak terjadinya *Arab Spring*.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder, yaitu data diperoleh dari sumber lain atau secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari tesis, skripsi, jurnal, buku, berita, bukti, catatan atau laporan historis yang terkumpul dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dikelola, diorganisasikan dan dipilih kemudian memutuskan hasilnya. Bersifat deskriptif karena akan menjelaskan penyebab-penyebab yang menjadi dampak terjadinya suatu peristiwa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori/kerangka berpikir, argumen utama, serta sistematika penulisan.

BAB II nantinya akan menjelaskan platform demokratisasi dan politik luar negeri Amerika Serikat

BAB III memuat pembahasan tentang dinamika demokratisasi di Irak dan Suriah

BAB IV memuat tentang analisa upaya Amerika Serikat dalam melakukan demokratisasi di Irak dan Suriah

Bagian paling akhir yakni BAB V, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan skripsi yang sudah disusun oleh penulis.